



INFO OTDA

Informasi Seputar Otonomi Daerah

Edisi 4 / Juli - Agustus 2013

www.otda.kemendagri.go.id

Twitter : follow us @OtdaInfo



2 Menghadang Laju Korupsi Kepala Daerah

4 Presiden Lantik Pamong Praja Muda IPDN

6 Peningkatan Kapasitas Instrumen Pembiayaan 15 SPM

8 Local Excellence for Inter-Regio Equality



Produk-Produk Kegiatan Strategis Kementerian Dalam Negeri 2009 – 2013

Produk-produk kegiatan strategis Kementerian Dalam Negeri merupakan potret pelaksanaan tugas dan fungsi jajaran Kementerian Dalam Negeri. Produk-produk kegiatan strategis juga merupakan upaya mendiseminasikan dan mempublikasikan capaian-capaian kinerja yang menjadi tanggungjawab Kementerian Dalam Negeri bagi para pemangku kepentingan. Melalui produk-produk kegiatan strategis ini Kementerian Dalam Negeri juga bermaksud untuk menjangkir masukan, kritik dan saran dari para pemangku kepentingan terhadap apa yang sudah dilakukan oleh jajaran Kementerian sehingga ke depan dapat semakin meningkatkan kualitas kegiatan-kegiatannya untuk lebih berkontribusi terhadap terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Berikut daftar Produk-produk kegiatan strategis Kementerian Dalam Negeri. **DITJEN OTDA** : Profil Kepala Daerah*Percepatan Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)* Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 Tentang Kerangka Nasional Pengembangan

Kapasitas Pemerintahan Daerah* Himpunan Risalah Proses Penyusunan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta* Info Seputar Otonomi Daerah (www.otda.kemendagri.go.id)-- **IPDN**: Laporan Pendidikan Pada Acara Wisuda Program D.IV , S.1 dan S.2 Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor 2013* **DITJEN KESBANGPOL**: Modul Pendidikan Wawasan Kebangsaan* Undang-Undang No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan* Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. **DITJEN PUM**: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. **DITJEN BANGDA**: Profil Perencanaan Tata Ruang Wilayah (RTRW)* Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD)* Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). **BADAN DIKLAT**: Peningkatan Kapasitas Daerah melalui Program Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (OKPPD) bagi Peningkatan Kapasitas Daerah melalui Program Orientasi Kepemimpinan dan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bagi Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota dan Executive Education Training Program Harvard Kennedy School USA. **DITJEN DUKCAPIL**: Kaleidoskop E-KTP 2011-2013* Majalah Bidik Edisi Sept-Okt 2013. **DITJEN KEUDA**: Profil APBD Tahun Anggaran 2013. **BPP** : Ringkasan Kajian Kelembagaan Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/kota sebagai Perangkat Kementerian Dalam Negeri* Media BPP Volume 12 No.3. **DITJEN PMD**: Asistensi serta Hasil Profil Desa & Kelurahan Tahun 2012* Katalog Teknologi Tepat Guna (TTG) 2011 dan 2012; Profil Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek)*Informasi PNPM Mandiri Perdesaan* **ITJEN**: Prestasi Kemendagri Menuju Clean Governance. **BNPP** : Desain Besar (Grand Design) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025* Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014* **BIRO HUKUM SETJEN**: Himpunan Peraturan Permendagri tahun 1978 – 2013.

Djohermansyah Djohan

Menghadang Laju Korupsi Kepala Daerah



Ada fenomena yang sangat memperlihatkan dari gelaran Pilkada secara langsung yang dimulai sejak 2005 yaitu maraknya kasus korupsi yang menyeret kepala daerah. Sejak 2005 hingga 2013 sudah lebih dari 300 kepala daerah yang terbelit perkara hukum. "Dari 2005 sampai sekarang sudah 304 kepala daerah terbelit masalah hukum di mana 86 persen diantaranya adalah kasus korupsi," ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Djohermansyah Djohan saat diwawancarai redaksi *Info Otda* di ruang kerjanya (06/09).

Memang sejak diberlakukannya Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamankan bahwa kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, biaya politik di Indonesia menjadi tinggi.

Kondisi ini dikhawatirkan akan membuat tujuan desentralisasi dan otonomi daerah yaitu tujuan demokrasi di mana pemerintahan daerah sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang secara agregat akan menyumbang terhadap pendidikan politik secara nasional untuk mempercepat terwujudnya masyarakat madani atau *civil*

society dan tujuan kesejahteraan di mana mengisyaratkan pemerintahan daerah untuk menyediakan pelayanan publik bagi masyarakat lokal secara efektif, efisien dan ekonomis akan sulit tercapai.

Berangkat dari kondisi ini, pemerintah pun melakukan berbagai upaya meminimalisir praktek korupsi kepala daerah yang sudah terbukti mengganggu dan merusak sendi-sendi pemerintahan dan kehidupan masyarakat di daerah. Untuk mengetahui lebih mengenai upaya-upaya ini berikut petikan wawancara *Info Otda* dengan Dirjen Otda.

Apa akar masalah maraknya praktek korupsi kepala daerah saat ini?

Sistem pemilihan langsung kepala daerah membuat biaya pilkada kita sangat besar. Kita melihat ada korelasi yang erat antara sistem pemilihan langsung dengan terjadinya korupsi kepala daerah termasuk wakilnya. Pemilihan langsung memaksa para calon harus mempunyai modal yang besar. Karena kebutuhan dana besar, calon-calon kepala daerah mencari dana ke mana-mana, mulai dari kantong sendiri, mencari sponsor bahkan dari cukong-cukong yang berani mengongkosi. *Nah*, setelah

terpilih dia memutar otak bagaimana cara mengembalikan uang pribadinya dan bagaimana 'balas budi' kepada para penyumbang dana. Mulailah mengkorupsi dana APBD dengan cara menaikkan harga barang atau menyalahgunakan wewenang. Di politik tidak ada yang gratis. Belum lagi biaya-biaya paska pemilihan buat partai pengusung yang minta dukungan dan bantuan serta konsitusien yang minta dibantu ini, dibangun itu. Akibatnya kepala daerah terjebak dalam permainan politik uang untuk memenuhi semua itu. Dari mana uangnya? Gaji kepala daerah tidak besar. Ini akar masalahnya.

Jadi kesalahan ada di sistem pemilihan kepala daerah saat ini?

Sekarang siapa saja bisa menjadi calon sepanjang ada modal, bisa sewa kendaraan (parpol), uang buat kampanye, tidak dilihat rekam jejaknya. Keteraturan dan kejelasan aturan tidak ada, siapa saja boleh mendaftar dengan syarat-syarat yang longgar. Padahal mereka inikan calon pemimpin yang akan menahkodai birokrasi yang jumlah ribuan bahkan puluhan ribu. Belum lagi merencanakan dan menjalankan program-program pemerintah. Itu butuh kemampuan manajerial untuk membawa birokrasi mewujudkan program-program pembangunan. Perlu kompetensi bagaimana mengelola sumber daya baik barang maupun uang, berkomunikasi dengan DPR sampai bagaimana cara menanggulangi bencana.

Bukannya kepala daerah yang dipilih langsung rakyat punya legitimasi yang kuat?

Legitimasi saja tidak cukup tetapi juga dibutuhkan kapasitas. Pasar bebas demokrasi mengabaikan kompetensi. Dalam *leadership* harus kompetensinya dulu, kemudian integritas. Kalau ini diabaikan maka sulit bagi kepala daerah berbuat terbaik. Di masyarakat kita, belum tercipta tradisi mendapatkan jabatan publik dengan dana publik. Disamping ekonomi yang belum kuat, pola pikir masyarakat kita bahwa kalau ada pilkada kandidat yang majulah yang

memberi uang, bukan masyarakat yang menyumbang. Kalau di negara demokrasi yang sehat, publik yang suka dengan seorang kandidat rela menyumbang walau hanya sedollar dua dollar. *Nah*, tradisi itu belum ada di kita. Para kandidat harus mengikuti pola pikir dan budaya para pemilih kita.

Jadi selain ada kelemahan di sisi aktor (para kandidat), ada masalah juga pada pemilih kita?

Demokrasi bebas seperti sekarang ini bisa dimainkan dengan baik jika pendapatan sebuah negara sudah diatas USD 6.000, kita masih berkisar USD 3.000-3.500 belum menyentuh angka USD 4.000, yang terjadi publik bukan menyumbang malah meminta uang dari calon. Bahkan dari semua kunjungan di sebuah daerah Indonesia yang sedang pilkada, kita mendapat laporan ada rumah yang memampang pengumuman di pintu rumahnya dengan tulisan ‘rumah ini menerima serangan fajar’. Kalau begini di mana letak demokrasi yang mulia, suara rakyat suara Tuhan?. Idealnya bukan hanya orang yang dipilih (kandidat) yang punya pengetahuan bagaimana kalau menjadi pemimpin, tetapi orang yang memilih juga punya pengetahuan tentang itu. Sedikit sekali pemilih kita yang memahami bagus tidaknya seorang calon.

Apa upaya pemerintah untuk menghadang laju korupsi kepala daerah ini?

Di RUU Pilkada yang saat ini sedang dibahas, kita usulkan agar hanya gubernur yang dipilih langsung, sementara bupati/walikota dipilih oleh DPRD yang prosesnya diawasi oleh KPK untuk menghindari politik uang. Celah-celah kekuasaan yang bisa digunakan untuk melakukan korupsi melalui revisi UU Pemda juga kita tutup. Hasil pengamatan kita potensi korupsi ada diperizinan yang strategis dan ekologis (tambang, hutan, migas, dan perizinan eksplorasi SDA yang lain). Upaya lainnya adalah, masih di revisi RUU Pemda, akan ada klausul yang melindungi kepala daerah untuk melakukan inovasi kebijakan yang tujuannya untuk peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Kita lindungi agar kebijakannya tidak dikriminalisasi selama kebijakan itu dilaporkan, dibawa prosedur legal ke DPRD, dibuatkan perdanya, dan dilaporkan usulan perencanaannya ke Pusat. Sering kita temui kesalahan

“Di RUU Pilkada yang saat ini sedang dibahas, kita usulkan agar hanya gubernur yang dipilih langsung, sementara bupati/walikota dipilih oleh DPRD yang prosesnya diawasi oleh KPK untuk menghindari politik uang.”

kebijakan dikriminalisasi dan akhirnya masuk penjara. Desentralisasi tidak boleh menutup inovasi agar rakyat bisa mendapat pelayanan yang lebih baik.

Apakah ini berarti kewenangan perizinan di kabupaten/kota menjadi ladang korupsi?

Pengawasan yang lemah dalam pemberian perizinan oleh kabupaten/kota ini ditenggarai menjadi ladang korupsi. Dalam revisi RUU Pemda segala perizinan yang bersifat strategis dan ekologis kita tarik ke tingkat provinsi untuk lebih mudah melakukan pengawasan. Izin ini *kan* ladang uang, siapa yang punya wewenang dia punya uang banyak. Itulah yang kita tenggarai sebagai lahan korupsi. Tinggal bagaimana memastikan kabupaten/kota mendapat kompensasi hasil karena itu wilayah dia. Kewenangan terlalu besar maka korupsinya juga besar, makanya kewenangan ini kita tarik ke provinsi. Namun, yang terkait dengan pelayanan publik terutama yang mendasar seperti kesehatan, pendidikan tetap menjadi kewenangan kabupaten/kota.

Apakah upaya ini diyakini mampu menurunkan tingkat korupsi di daerah?

Kita yakin jika tiga hal ini ditetapkan dalam RUU Pilkada dan Pemda, korupsi yang melanda para kepala daerah akan turun signifikan. Karena ongkos menjadi kepala daerah tidak lagi mahal, izin strategis dan ekologis tidak lagi di kabupaten/kota, lalu kalau buat kebijakan yang bersifat inovasi kita lindungi. Kita sekarang ingin demokrasi untuk kesejahteraan, bukan demokrasi selebar dan seluas-luasnya yang hanya menghasilkan kepala daerah yang korup. Bukan hanya kepala daerah, banyak pegawai-pegawai (PNS) yang juga terikut masuk penjara. Data terakhir 1.221 pegawai yang terkena masalah hukum. Kepala Daerah kena, sekduanya kena, kepala dinas kena, stafnya bahkan sampai ke kecamatan. Ini karena terlalu dibuka lebar (pemilihan langsung) jadinya ongkosnya terlalu mahal. Kasihan, mereka puluhan tahun berkarier, terseret-seret karena politik kepala daerah yang memaksa mereka. Kalau birokrasi menjadi

gaduh seperti ini bagaimana mereka bisa melayani publik dengan baik. Makanya sekarang kabupaten/kota kita tutup dulu. Dalam amanat konstitusi kita, pemilihan kepala daerah itu tidak disebutkan secara langsung, yang ada hanya secara demokratis (Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 menyebutkan “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”)

Pemerintahan Daerah (Kabupaten/Kota) seperti apa yang diinginkan melalui revisi kedua RUU ini?

Saat pemilihan usai, pegawai yang dianggap tidak memihak calon yang menang akan di *nonjob*-kan semua dari jabatannya, sedangkan yang dianggap memihak akan diberi kedudukan padahal tidak sesuai dengan kompetensinya. Bayangkan bagaimana pemerintahan diurus berdasarkan *koncoisme* seperti itu. Ini sangat serius dan tidak boleh dilanjutkan. Dengan tidak pemilihan langsung, maka birokrasi kita juga punya efek kembali netral dan tidak dipolitisasi. Kita sangat khawatir kalau kita tidak merubah kondisi ini melalui regulasi (RUU) maka pemda yang baik, desentralisasi yang baik melayani masyarakat, punya tata kelola pemerintahan yang baik, tidak korupsi, integritas kepemimpinan, dan fokus kepada kesejahteraan masyarakat akan semakin jauh. Makanya kita *all out* menyakini dewan dan partai, bahwa tidak ada salahnya jika kita melangkah agak kurang pas mundur dulu selangkah, nanti suatu hari kalau memang sudah terbangun sistem di mana pemilih dan aktornya sudah kompeten baru kita mulai lagi. Jadi berhenti sejenak untuk mengatasi persoalan, membangun sistem pemilihan yang utuh dan komprehensif, termasuk perilaku penyelenggara (KPUD).

Bagaimana perkembangan terakhir pembahasan kedua RUU ini?

Kita akan kembali membahas kedua RUU ini pada masa sidang terakhir 2013. Untuk RUU Pilkada isu yang masih tersisa masih terkait sistem pemilihan (Bupati/Walikota dipilih DPRD dan Gubernur dipilih langsung). Kita meyakini pilihan ini adalah yang paling pas dengan realitas masyarakat. Kalau RUU Pemda masih ada beberapa isu terutama terkait kewenangan yang masih dibahas karena memang RUU Pemda lebih kompleks makanya dibahas dalam Pansus. Kita targetkan bisa selesai tahun ini terutama RUU Pilkada. *oa*



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melantik 1.459 pamong praja muda Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN), di kampus IPDN Jatinangor - Sumedang, Jawa Barat. (28/8/2013)

Presiden Lantik Pamong Praja Muda IPDN

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melantik 1.459 pamong praja muda Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN). Presiden SBY pun memberi empat pesan pada para pamong praja muda yang akan segera memulai penugasan dalam sambutannya di Kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Rabu (28/8/2013).

Pertama, laksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan dengan sebaik-baiknya untuk rakyat, berbuatlah yang terbaik. *Kedua*, Presiden SBY meminta pamong praja muda untuk ikut memelihara kehidupan masyarakat yang rukun dan damai, serta penuh toleransi. Ini penting dalam kehidupan masyarakat yang majemuk Indonesia.

Ketiga, Presiden SBY mengajak para pamong praja muda untuk membangun citra pemerintahan yang baik dan bersih, serta selalu dirasakan kehadirannya oleh masyarakat.

Pesan keempat, Presiden SBY meminta para pamong praja muda yang akan segera bertugas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sesuai sumpah dan janji jabatan baik kepada Tuhan, pemerintah, maupun kepada rakyat. "Jauhi segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi," tegas Presiden.

Presiden SBY juga menyampaikan selamat kepada para pamong praja muda yang dilantik. "Kalian telah berhasil menyelesaikan pendidikan di IPDN dengan baik dan mengantarkan kalian menjadi pamong praja muda yang siap mendarmabaktikan diri untuk bangsa dan negara tercinta," tutur Presiden.

Ke depan tugas utama yang diemban oleh para pamong praja adalah tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan umum. Tugas-tugas ini antara lain pembinaan ideologi Pancasila, pembinaan kesatuan bangsa, pembinaan politik dalam negeri, hingga tugas pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum.

Selain itu, para pamong praja juga memiliki tugas untuk melakukan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah, serta melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan kepomongprajaan. Presiden menyatakan, lulusan IPDN angkatan XX tahun 2013 ini merupakan hasil dari upaya perbaikan dan penyempurnaan secara menyeluruh terhadap sistem pendidikan di IPDN.

"Kita telah menghentikan cara-cara pengasuhan yang merusak. Kita tidak ingin akibat metode pengasuhan yang salah, para pamong praja mempunyai perilaku yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan karakter abdi negara dan pemimpin masyarakat," tegas Presiden

saat memberikan amanat.

Presiden hadir dalam upacara pelantikan tersebut didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono. Juga tampak sejumlah menteri, diantaranya Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, serta dihadiri juga oleh para pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Menurut Presiden, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pola pengasuhan yang lebih sehat dan mendidik kepada para praja. Praja adalah sebutan untuk peserta didik program diploma dan program sarjana yang merupakan peserta didik ikatan dinas dan tugas belajar di lingkungan IPDN.

Sementara Mendagri Gamawan Fauzi menyatakan terkait upaya penyempurnaan sistem pendidikan di IPDN, Kemendagri tidak lagi mentoleransi tindak kekerasan di lingkungan kampus tersebut. "Dalam empat tahun ini sudah 45 praja yang diberhentikan dengan tidak hormat. Mereka harus mengembalikan uang negara yang telah diterima selama berada di IPDN. Saya tidak main-main kalau ada yang melanggar. Seperti tahun 2013 ini, ada 11 praja yang dipecat," tegas Mendagri.

Sumber : Kompas, 29/08/2013 dan okezone.com. 28/08/2013

Mendagri Lantik Ganjar-Heru



Mendagri ucapkan selamat kepada Ganjar - Heru, sebagai Gubernur/Wakil Gubernur Jateng

kemenangan seluruh rakyat Jateng tanpa membeda-bedakan afiliasi politik dan asal usul golongan,” ujar Mendagri dalam sambutannya.

M e n u r u t Mendagri, sebagai Kepala Daerah, Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko harus bersungguh-sungguh m e n g e n t a s k a n k e m i s k i n a n ,

memberantas buta aksara yang masih tinggi, serta memperluas akses setiap jenjang pendidikan dan fasilitas kesehatan demi kemakmuran rakyat Jateng secara keseluruhan.

“Perkuat agenda sinergis pembangunan secara nasional dalam kaitannya jabatan gubernur yang mempunyai peran ganda sebagai kepala daerah otonomi sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah, maka menjadi tugas saudara untuk mengkoordinasikan

“Mendagri juga meminta agar slogan “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” yang disampaikan pada saat kampanye oleh pasangan Ganjar Pranowo dan Heru Sudjatmoko, dapat direalisasikan di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

dan menjamin sinergitas kebijakan pembangunan kabupaten/kota se-Jateng,” kata Mendagri.

Mendagri menyakini, bahwa kombinasi gubernur dan wakil gubernur terpilih yang merupakan paduan tokoh yang berpengalaman di tingkat nasional dan daerah bisa bersinergi membawa Provinsi Jateng untuk lebih maju di masa mendatang.

Diakhir amanatnya, Mendagri juga meminta agar slogan “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” yang disampaikan pada saat kampanye oleh pasangan Ganjar Pranowo dan Heru Sudjatmoko, dapat direalisasikan di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

S etelah KPUD Jawa Tengah menetapkan pasangan Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko sebagai calon terpilih Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2018, kedua pasangan inipun dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di gedung DPRD provinsi di Semarang (23/08) dalam rapat paripurna istimewa DPRD Jateng.

“Jadikanlah bulan ini sebagai penanda kemenangan saudara,

Dilantik Mendagri Mangku Pastika Kembali Pimpin Bali

B ertempat di Gedung DPRD Bali di Denpasar, dalam sebuah sidang paripurna DPRD Bali, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi melantik Made Mangku Pastika dan Ketut Sudikerta menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Bali periode 2013-2018, (29/8/2013).

Pelantikan pasangan yang dipopulerkan dengan paket Pastikerta dipimpin Ketua DPRD Bali Anak Agung Ngurah Oka Ratmadi dalam sidang paripurna DPRD Bali.

Hadir juga dalam prosesi pelantikan ini Menteri Perikanan dan Kelautan Cicip Sutarja dan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboj.

Dalam sambutannya, Mendagri mengajak semua elemen masyarakat Bali untuk bersama membangun daerahnya. “Pemerintah dan masyarakat Bali hendaknya bersama-sama membangun Bali yang berlandaskan pada tiga hal dasar Tri Hita Karana atau keseimbangan hubungan manusia, Tuhan dan lingkungan,” ungkap Mendagri.

Mendagri juga berpesan agar semua

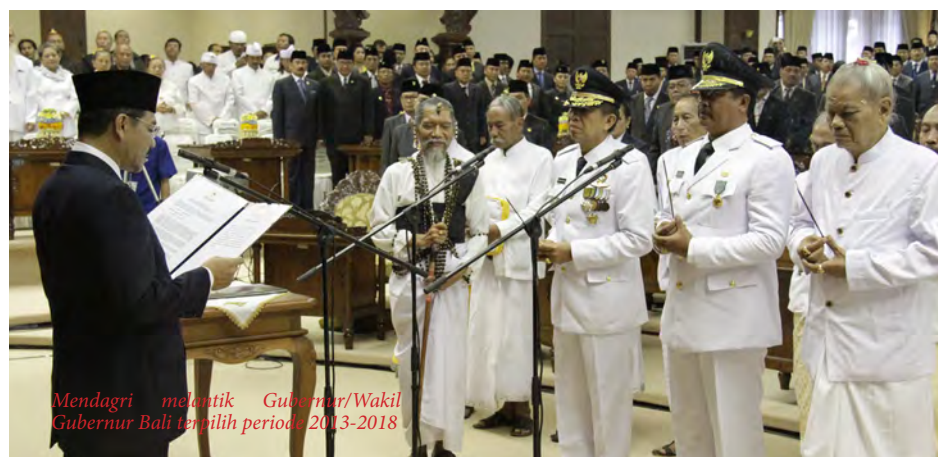
perbedaan afiliasi dalam proses pilkada hendaknya sekarang ditanggalkan demi membangun Bali ke depan yang lebih baik.

Mendagri juga menyampaikan beberapa capaian pembangunan Provinsi Bali yang ke depan harus bisa lebih ditingkatkan.

Capain itu antara lain pencapaian angka pertumbuhan ekonomi hingga 6,7 persen, indek pembangunan manusia, penurunan angka kemiskinan dan

pengangguran hingga peningkatan APBD.

“Perbedaan afiliasi dalam proses pilkada hendaknya sekarang ditanggalkan demi membangun Bali ke depan yang lebih baik.”



Mendagri melantik Gubernur/Wakil Gubernur Bali terpilih periode 2013-2018

Peningkatan Kapasitas Instrumen Pembiayaan 15 SPM



Selama dua hari, 28-30 Agustus 2013 Direktorat Jenderal Otonomi Daerah menggelar Pertemuan dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Instrumen Pembiayaan 15 Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dalam pertemuan dengan peserta berasal dari Kementerian/Lembaga 15 bidang SPM; Komponen terkait Lingkup Kemendagri; Pemerintah Daerah; Kepala Bappeda Provinsi seluruh Indonesia; Biro Organisasi/Biro Otda yang menangani dana dekonsentrasi percepatan penerapan SPM; dan Fasilitator pendamping percepatan penerapan SPM di Provinsi, hadir sebagai narasumber Para Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama Kementerian/lembaga, Direktur UPD I Ditjen Otda dan Tim Ahli SPM sebagai Pembahas ara ini dibuka oleh bapak Dirjen Otda yang diwakili oleh Direktur UPD I DR. Kurniasih, SH, MA.

Memang salah satu persoalan implementasi 15 bidang SPM di daerah adalah terkait masalah pembiayaan. Untuk itulah pertemuan ini digelar untuk mencari langkah-langkah dan jalan keluar agar implementasi SPM bisa dipercepat dan masyarakat dapat terjamin dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Pertemuan ini menghasilkan beberapa

kesimpulan antara lain : (1) Pemerintah pada prinsipnya telah menyediakan berbagai opsi regulasi terkait SPM, untuk itu perlu komitmen dan dukungan dari para pihak, baik pusat maupun daerah agar bersinergi dalam upaya percepatan penerapan SPM; (2) Perlunya penguatan aspek supervisi, fasilitasi serta intervensi sumberdaya dari pemerintah dalam hal ini Kementerian/Lembaga pengampu SPM kepada daerah agar tercipta akselerasi dalam implementasi SPM di Daerah; (3) Data base ataupun profil SPM menjadi salah satu titik tolak dalam perumusan integrasi ke dalam dokumen rencana dan dokumen anggaran daerah, oleh karenanya pemilihan dan pemilihan sumber data seyogyanya mengedepankan SKPD pengampu SPM sebagai sumber data utama; (4) Pemerintah perlu mengapresiasi daerah yang telah berhasil mengimplementasikan SPM dengan baik melalui program-program Kementerian/Lembaga pengampu SPM yang di kedaerahkan ataupun jenis-jenis reward lainnya; dan (5) Mekanisme pelaporan baik laporan umum maupun teknis SPM agar menjadi prioritas pemerintah daerah (SKPD Pengampu SPM) karena dengan berpijak pada pelaporan

tersebut pemerintah dapat memetakan secara rinci dan valid progres penerapan SPM untuk dapat mengidentifikasi serta merumuskan jenis intervensi kebijakan.



Diterbitkan:
DITJEN OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
JL. Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat 10110
Website : www.otda.kemendagri.go.id
email : bagren_otda@kemendagri.go.id
Twitter : follow us @OtdaInfo

Penanggung jawab : Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Redaktur : Sekretaris Ditjen Otda, Kepala Bagian Perencanaan Setditjen Otda
Penyunting/Editor : Kasubag. Data dan Informasi, Kasubag. Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
Sekretariat : Kasubag Penyusunan Program dan Anggaran; Kasubag Perundang-undangan; Kasubag Persuratan dan Arsip; Kasubag Perlengkapan dan RT; Para Kasubag TU Direktorat Ditjen Otda

Konsep Arah Kebijakan Ditjen Otonomi Daerah 2015-2019

Strategi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan diarahkan kepada persaingan yang sehat antar lembaga dalam melaksanakan peran dan tugasnya mengimplementasikan desentralisasi dan otonomi daerah; pembentukan lembaga-lembaga diutamakan berbasis pelayanan dasar termasuk investasi yang dialokasikan kepada lembaga-lembaga dimaksud; serta efisiensi urusan-urusan internal di pemerintahan daerah yang efisien melalui dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

Arah kebijakan:

- Fasilitasi dalam menemukenali urusan/fungsi antar tingkatan pemerintahan dan antar lembaga pemerintahan.
- Fasilitasi dan inovasi dalam memprioritaskan penyelenggaraan pelayanan dasar bagi para pihak.
- Fasilitasi dalam mengimplementasikan penyelenggaraan pelayanan yang didukung oleh standar pelayanan yang tepat.
- Fasilitasi dalam memenuhi kompetensi personal dan dalam menciptakan lembaga yang reliabel yang menyediakan pelayanan publik.
- Inovasi-inovasi bagi penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien.
- Meningkatnya Peran pengawasan dari penerapan standar bagi praktek tatakelola pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik.
- Peran verifikasi dalam strategi-strategi efisiensi bagi tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik.
- Promosi capaian indeks pembangunan manusia sehubungan dengan konvensi dan perjanjian lokal, regional dan global.
- Pengembangan pelayanan melalui kemitraan swasta dan publik (PPP).
- Pengembangan kelompok dan jaringan bagi kemandirian masyarakat dan masyarakat kelas menengah.

Strategi Pelaksanaan Penataan Daerah dan fasilitasi implementasi Otonomi Khusus serta Penguatan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah diarahkan pada peningkatan pemahaman terhadap situasi umum dari setiap daerah dan kesepakatan pemerintah daerah; kepemilikan pemerintah pusat atas berbagai klasifikasi terhadap kapasitas dan regulasi yang dimiliki oleh daerah dan strategi untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan berdasarkan kondisi riil di daerah; serta efisiensi dan efektivitas dari pemanfaatan sumber daya yang dapat

dikembangkan secara konstruktif, dimana sumber daya manusia dikedepankan diantara semua jenis sumber daya.

Arah Kebijakan:

- Kesiapan berbagai peraturan terkait praktek-praktek tatakelola pemerintahan pada daerah otonom dan daerah khusus/istimewa.
- Kapasitas ketersediaan alokasi keuangan untuk pelayanan publik.
- Upaya-upaya dalam menerapkan intervensi yang efektif dan optimalisasi penggunaan sumber daya lokal.
- Promosi terkait peningkatan modal dasar di daerah, investasi lokal dan pendapatan lokal bagi aktivitas sosial dan ekonomi.
- Pendekatan-pendekatan alternatif dan pendekatan-pendekatan baru terkait pelaksanaan otonomi daerah.

Strategi Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga diarahkan pada fasilitasi penyelenggara pemerintahan daerah dan para pemangku kepentingan terhadap kepemilikan pemahaman dasar dan pola pikir yang tepat dan sejalan terhadap kebijakan desentralisasi; kesepahaman bersama antara pemerintah pusat dan daerah pentingnya menjaga keberlangsungan kebijakan desentralisasi; dan persetujuan terhadap penyesuaian-penyesuaian dalam meningkatkan kualitas kebijakan desentralisasi.

Arah Kebijakan:

- Upaya-upaya penyempurnaan berbagai entitas pemerintahan daerah terhadap tuntutan efisiensi dan efektivitas tatakelola pemerintahan.
- Kepastian berbagai eksistensi lokalitas daerah, peraturan, tatacara dan kebijakan yang sinkron, produktif dan aplikatif dalam mendukung tatakelola pemerintahan.
- Upaya menciptakan pola pikir para pihak terkait tatakelola pemerintahan yang desentralistik.
- Upaya-upaya dalam menciptakan prilaku dan praktek tatakelola pemerintahan yang baik.
- Kapasitas kepala daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Strategi Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah diarahkan pada kemampuan serta keinginan pemerintahan daerah untuk melaporkan capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah; Kemampuan pemerintah pusat untuk mengevaluasi capaian

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menindaklanjutinya melalui pengembangan kapasitas yang dibutuhkan serta berkualitas; dan ketersediaan berbagai instrumen yang aplikatif, jelas dan berkeadilan.

Arah Kebijakan:

- Peran pengawasan dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penerapannya pada praktek tatakelola pemerintahan yang lebih baik.
- Peran pengawasan dalam mengakses para pihak terkait dengan upaya menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik.
- Kemampuan verifikasi terhadap dokumen perencanaan dalam upaya meningkatkan tatakelola pemerintahan.
- Upaya-upaya komprehensif terhadap peningkatan kapasitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan tatakelola pemerintahan.
- Kapasitas dan kelengkapan regulasi dalam mengakses para pihak terkait pelaporan pemerintahan daerah.

Strategi Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya diarahkan pada peningkatan kapasitas substansial dan manajerial yang tinggi; pembentukan kemampuan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang desentralistik; serta pembentukan tingkat kepastian dan konsistensi yang tinggi terhadap kebijakan dan program yang diciptakan.

Arah Kebijakan:

- Kemampuan dalam mengkoordinasikan penciptaan jaringan dan publikasi terkait pelaksanaan otonomi daerah.
- Kemampuan dalam mengkoordinasikan penyiapan portfolio dan knowledge management terkait pelaksanaan otonomi daerah.
- Kemampuan dalam mensinerjikan pelaksanaan kajian terkait pelaksanaan otonomi daerah.
- Kemampuan dalam mensinerjikan fasilitasi pelaksanaan desentralisasi melalui peran pendampingan dan konsultasi.
- Identifikasi dan penerapan berbagai peraturan serta keterkaitannya dalam mendukung implementasi praktek tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik. (Bagren OtDa).

LOCAL EXCELLENCE FOR INTER-REGION EQUALITY

DR. Herbert Siagian, M.Sc*

LOCAL EMPOWERMENT. More than a decade local regions in Indonesia have obtained autonomy from the central authority to deliver functions by themselves. Functions submitted are related to the public service delivery to be delivered especially the very basic ones for the reasons of effectiveness, efficiency and transparency. The availability of basic needs in local regions assures the fulfillment of basic needs so that the society possesses capacity to empower themselves to perform activities related to the local wisdoms which are everything available in the local region, used as well as recognized by the society in the region. Local wisdoms can be in the form of goods/products/services, tourism attractions/historical sites, local habits, local beliefs, and many others. Local wisdoms have been presumably performed by the society from generation to generation, so that by nature the society has the competence to enhance them.

LOCAL EQUALITY. The development in Indonesia does not occur equally. There are regions which are considered marginal such as outer small islands, bordered country's regions, newly formed regions, post-conflict/post-disaster regions and suburb/city's buffer zone surrounding regions. The autonomy assignment is regarded as the breakthrough to marginalized regions to change and improve. Through efforts to enhance their local wisdoms, these marginalized regions have opportunities to equalize themselves among other regions. This regional equality is encouraged to form new magnitudes of regional development, so that they do not depend only on already developed regions. While, existing development magnitudes such as in Western Indonesian regions, in Java island, in country's capital city or in city areas are still able to enhance their own local product excellences.

BASIC CAPACITY. Equalizing regions insist the availability of society's basic capacity in a region. Basic capacity

availability is indeed encouraged and part of autonomy regulations which are in terms of the implementation of standardized basic services, known as minimum service standards (MSS). The MSS implementation expectedly forms such basic capacity to the society as: basic capital for social and economic activities in the region; investment attractions; poverty alleviation; triggers and enhancers of local revenues; initial efforts on improving public service quality; as well as society self-help/the formation of middle-class society.

LOCAL WISDOM. Once the basic capacity has been available, the society can empower themselves to enhance the local wisdom. Local wisdoms are easily meant by local products. It is understandable that due to more than a quarter billion populations, Indonesia becomes a haven to various products. Among these sorts of products, there are products called local products. Local products possess their main characteristics, first, they are produced using domestic raw materials, and second, they are made by local labors. In principle, local products consist of products related to agricultural yields, consumer goods, products related to tourism and individual services. Such types of local products are fresh fruits, canned foods, herbal medication, furniture, fashion, art workers, tourism attractions/sites and many others.

LOCAL EXCELLENCE. To gain added value and economic value, local products must possess their excellences. The excellence of a local product is indicated by their high demand and their high local values. Remembering that every local product is unique, it needs several factors to form strategies appropriate to the designated local product uniqueness. Therefore, since every local product is different one to another, the approach of marketing strategy is that: first, its views to product specifications themselves or known as resource-based view; and second its orientation toward markets which are targeted by the local products or commonly

called market orientation. The approach of resource-based view is to discover strategic factors of products based on their rareness, inimitable, unsubstitutable and valuable. The approach of market orientation is to discover strategic factors of products based on highly attention to customers, rival performance and market responsiveness. Both approaches do concern to the wise use of raw materials, environmentally friendly and product safety.

EFFORTS TO ACHIEVE. Efforts to achieve the excellence of local products are varied among one product to another. In general, the following efforts must be performed namely:

1. Identifying local products (social/cultural/economic) with comprehensive approaches.
2. Accommodating protection/property rights of local products with their designated excellence.
3. Building images towards the local product excellence.
4. Internalizing the deployment of local product excellence in extensive ways with the role models.
5. Building advocacy and advisory centers towards the local products excellence.
6. Facilitating efforts in determining local product excellence which has been obtained so far.
7. Implementing approaches on resource-based orientation and market orientation as reference in discovering local product excellence.
8. Conditioning local product excellence which can compete, be chosen and bought when they are offered together with similar existing products.
9. Realizing marketing strategies to excellent local products and comprehensive recommendations attached with those excellent local products.
10. Mentoring the implementation of marketing strategies which have been produced with all recommendations.

**Head of Planning Division
Directorate General Regional Autonomy
The Ministry of Home Affairs Republic Indonesia*



Kotak Saran

Anda punya saran masukan buat Info Otda !!

Kirim email ke : bagren_otda@kemendagri.go.id & bagren_otda@yahoo.com